

## FOKUS DIPLOMASI INDONESIA 2022 DAN PERAN DIPLOMASI DPR RI

Rizki Roza

### Abstrak

*Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menyampaikan fokus diplomasi yang akan dijalankan Indonesia pada tahun 2022. Fokus diplomasi ini akan menjadi pedoman bagi DPR dalam menjalankan peran diplomasinya. Tulisan ini menggambarkan tantangan diplomasi yang akan dihadapi Indonesia, dan bagaimana DPR dapat menjalankan peran diplomasinya dengan optimal. Pada 2021 DPR telah menjalankan peran diplomasi dengan mengirimkan delegasinya berperan aktif di berbagai forum kerja sama antarpemerintah. Pada tahun 2022 sejumlah persoalan masih akan menjadi tantangan diplomasi Indonesia, yaitu upaya global mengakhiri pandemi dan pemulihan ekonomi dunia; persoalan perdamaian dan kemanusiaan di berbagai belahan dunia; dan tentunya upaya perlindungan WNI, serta kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Presidensi G20 Indonesia dan posisi DPR RI sebagai tuan rumah pertemuan IPU akan melahirkan tantangan sekaligus peluang bagi kepemimpinan internasional Indonesia. Dihadapkan pada kondisi ini, DPR harus memiliki strategi diplomasi yang tepat agar setiap langkah diplomasi DPR dapat menghasilkan dukungan optimal bagi kebijakan luar negeri Pemerintah.*

### Pendahuluan

Pada 6 Januari 2022, Menteri Luar Negeri RI Retno L.P. Marsudi menyampaikan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (PPTM) Tahun 2022 yang menggambarkan capaian Kementerian Luar Negeri pada tahun 2021 dan fokus kebijakan diplomasi yang akan dijalankan pada tahun 2022 ([www.kemlu.go.id](http://www.kemlu.go.id), 6 Januari 2021). PPTM ini akan menjadi pertimbangan negara-

negara mitra Indonesia dalam mengelola hubungan kerja samanya dengan Indonesia. Bagi DPR RI, PPTM ini akan menjadi pedoman dalam menjalankan peran diplomasi DPR yang diamanatkan untuk turut memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia di forum internasional.

Sepanjang tahun 2021, dengan memperhatikan fokus kebijakan diplomasi Kementerian Luar Negeri dan perkembangan kerja sama



antarparlemen di dunia, DPR telah mengirimkan delegasi ke berbagai forum untuk menjalankan peran diplomasinya. Delegasi DPR berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia, termasuk untuk berkontribusi mencari solusi atas masalah-masalah global. Aktivitas diplomasi Pemerintah dan DPR sepanjang tahun 2021 sangat dipengaruhi oleh upaya global memerangi pandemi dan upaya pemulihan berbagai sektor kehidupan yang terdampak oleh pandemi. Isu-isu yang menonjol di kawasan dan global juga tidak luput dari perhatian delegasi DPR RI. Lalu, bagaimana tantangan diplomasi Indonesia pada tahun 2022? Bagaimana peran diplomasi yang dapat dijalankan DPR? Dengan terlebih dahulu memberi uraian singkat peran diplomasi yang telah dijalankan DPR selama tahun 2021, tulisan ini menggambarkan secara singkat tantangan yang akan dihadapi diplomasi Indonesia pada tahun 2022 dan bagaimana DPR akan menjalankan peran diplomasinya untuk mendukung langkah-langkah Kementerian Luar Negeri.

## Kontribusi Diplomasi DPR 2021

Pandemi COVID-19 telah memberi pengaruh besar terhadap setiap sendi kehidupan manusia, termasuk bagaimana hubungan antarnegara dijalankan. Pandemi mendesak setiap bangsa untuk menyadari pentingnya kerja sama global untuk memperkuat infrastruktur dan tata kelola kesehatan; ketahanan ekonomi dunia; dan memperkuat multilateralisme serta mengesampingkan rivalitas.

Bagi Indonesia, pandemi mendorong Kementerian Luar Negeri untuk mengubah fokus prioritas diplomasi yang dijalankan Kementerian Luar Negeri sejak 2020 hingga saat ini. Pandemi telah menyebabkan keterbatasan dalam aktivitas diplomasi sekaligus menjadi bagian tidak terpisahkan dari setiap manuver diplomasi yang dijalankan oleh Pemerintah maupun DPR.

Diplomasi kesehatan menjadi fokus pertama Kementerian Luar Negeri pada tahun 2021, yaitu untuk membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional. Diplomasi kesehatan mencakup upaya untuk menjamin pemenuhan kebutuhan vaksin nasional dan mengupayakan terwujudnya kesetaraan akses terhadap vaksin bagi seluruh negara di dunia. Delegasi DPR dalam berbagai kesempatan forum kerja sama antarparlemen sepanjang tahun 2021 turut memperjuangkan upaya Pemerintah di sektor ini. Antara lain dalam rangkaian pertemuan *Preparatory Committee 5<sup>th</sup> World Conference of the Speakers of Parliament (5WCSP)* misalnya, Delegasi DPR RI berulang kali menyuarakan pentingnya penguatan kerja sama internasional dan prinsip multilateralisme untuk menghadapi pandemi dan segala dampak yang ditimbulkannya. Demikian pula dalam pertemuan di forum multilateral dan regional lainnya, seperti pada Sidang Umum *Inter-Parliamentary Union, Asian Parliamentary Assembly, ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*, dan MIKTA, serta dalam pertemuan-pertemuan bilateral dengan negara sahabat.

Upaya mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan hijau/pembangunan berkelanjutan juga menjadi salah satu fokus diplomasi Indonesia pada tahun 2021. Fokus

diplomasi ekonomi ini antara lain mencakup upaya mendorong implementasi kesepakatan Travel Corridor Arrangement (TCA), upaya perluasan akses pasar, dan integrasi ekonomi kawasan, menghadapi berbagai hambatan perdagangan, termasuk kampanye negatif terhadap komoditas unggulan Indonesia, terutama kelapa sawit, dan berbagai upaya terkait lainnya. Delegasi DPR juga turut memperjuangkan isu ini, misalnya melalui gagasan yang diusung Delegasi DPR dalam sejumlah pertemuan mengenai pentingnya untuk memastikan upaya pemulihan ekonomi dunia pascapandemi agar tetap sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Terkait isu komoditas sawit, Delegasi DPR juga turut menjajaki upaya membangun kerja sama minyak sawit dengan Turki.

Meskipun pandemi telah menimbulkan berbagai kesulitan di dalam negeri, komitmen Indonesia untuk terus berkontribusi memajukan berbagai isu kawasan dan dunia tetap menjadi salah satu fokus diplomasi Kementerian Luar Negeri pada tahun 2021. Isu *Women, Peace, and Security*, isu Rohingya, kerja sama Indo-Pacific, pemajuan dan perlindungan HAM, dan tidak terkecuali isu Palestina masih mendapat perhatian Indonesia. Keterbatasan aktivitas diplomasi parlemen akibat pandemi tidak menyurutkan perhatian DPR terhadap isu-isu tersebut. Melalui pertemuan AIPA *General Assembly* misalnya, Delegasi DPR RI mendorong ASEAN untuk terus menempuh dialog konstruktif berdasarkan kesepakatan bersama dan hukum internasional dalam mengelola isu Laut China Selatan. Bersama parlemen negara-negara sahabat, DPR juga turut memikirkan solusi terbaik bagi pemulihan demokrasi di Myanmar. Dan

sebagai wujud dukungan terhadap upaya tercapainya negara Palestina yang merdeka, demokratis, dan berdaulat, Delegasi DPR RI antara lain menyampaikan intervensi terkait Palestina pada sesi debat umum *Inter-Parliamentary Union (IPU) General Assembly* yang diselenggarakan pada Mei 2021.

## **Tantangan Diplomasi Indonesia 2022**

Pada Desember 2021, Direktur Jenderal *World Health Organisation (WHO)* Tedros Adhanom Ghebreyesus kembali menyerukan negara-negara di dunia agar berbagi vaksin COVID-19 dengan lebih adil dan merata. Menurut Tedros, terbatasnya suplai vaksin kepada negara-negara berpendapatan rendah telah menyebabkan 92 negara gagal mencapai target divaksinasi 40 persen populasinya sebelum akhir 2021. WHO menargetkan setiap negara dapat divaksinasi 70 persen populasinya pada pertengahan 2022 ([who.int](http://who.int), 29 Desember 2021). Meskipun pada awal 2022 telah mencatat jumlah kasus COVID-19 tertinggi sepanjang pandemi, Tedros juga menyampaikan optimismenya bahwa pandemi akan berakhir pada tahun 2022 jika negara-negara bekerja sama untuk menahan penyebarannya dan dapat mewujudkan distribusi vaksin yang adil dan merata.

Dihadapkan pada kondisi di atas, upaya global mengakhiri pandemi masih akan sangat mempengaruhi diplomasi Indonesia pada tahun 2022. Tantangan diplomasi Indonesia tahun 2022 adalah untuk memastikan ketersediaan vaksin demi mencapai target 70% vaksinasi penuh penduduk Indonesia pada

pertengahan 2022, dan turut memastikan ketersediaan vaksin, obat-obatan, dan perlengkapan medis lainnya bagi setiap negara di dunia, terutama bagi negara-negara rentan dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang lemah. Upaya ini masih akan menjadi bagian penting dari diplomasi Indonesia pada tahun 2022, dan telah ditegaskan oleh Menlu dengan menempatkan diplomasi kesehatan sebagai prioritas pertama Kementerian Luar Negeri tahun 2022.

Sementara pandemi belum berakhir, sejumlah permasalahan masyarakat internasional lainnya juga masih menuntut kerja sama kawasan ataupun dunia untuk bersama-sama menemukan solusi demi terwujudnya dunia yang stabil, damai, dan sejahtera. Mulai dari isu perdamaian dan kemanusiaan, seperti persoalan kemanusiaan dan demokrasi di Afghanistan setelah berkuasanya Taliban; isu proliferasi senjata nuklir; isu perdamaian Semenanjung Korea; isu pembangunan berkelanjutan yang sejumlah capaiannya merosot akibat pandemi; isu lingkungan hidup dan pemanasan global; isu krisis pengungsian di sejumlah kawasan konflik; hingga isu kemerdekaan bangsa Palestina dan berbagai persoalan lainnya masih membutuhkan komitmen kerja sama masyarakat internasional, termasuk Indonesia. Di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia masih menyaksikan perebutan pengaruh antara dua kekuatan besar dunia yang dapat mengganggu terwujudnya kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera. Di lingkungan Asia Tenggara, isu sengketa Laut China Selatan masih menjadi persoalan besar. Kawasan ini juga masih

menghadapi persoalan pengungsi Rohingya dan pemulihan demokrasi di Myanmar yang menjadi ujian bagi kredibilitas dan persatuan ASEAN.

Sebagaimana disampaikan dalam PPTM 2022, fokus diplomasi Indonesia tahun ini tidak mengalami perubahan signifikan dibanding tahun lalu. Pada tahun 2022 diplomasi kesehatan masih menjadi prioritas utama. Demikian pula diplomasi ekonomi untuk percepatan pemulihan ekonomi yang berbasis ekonomi hijau dan berkelanjutan serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; diplomasi perlindungan WNI; diplomasi kedaulatan yang mencakup akselerasi intensitas negosiasi perbatasan; dan diplomasi untuk berkontribusi bagi perdamaian dan kemanusiaan di kawasan dan dunia. Dihadapkan pada tantangan dinamika internasional yang digambarkan di atas dan telah menetapkan sejumlah fokus kebijakan, diplomasi Indonesia, baik yang dijalankan Pemerintah maupun DPR, juga menghadapi tantangan sekaligus peluang untuk memperjuangkan kepentingan nasional, yaitu Presidensi G20 Indonesia dan posisi DPR RI sebagai tuan rumah pertemuan IPU pada Maret 2022.

Presidensi G20 Indonesia akan menjadi tantangan penting dalam membangun profil Indonesia sebagai aktor internasional yang berpengaruh. Melalui G20, Indonesia dapat menjembatani kepentingan negara maju, berkembang, dan negara miskin saat ketimpangan di antara mereka terus meluas. Melemahnya multilateralisme di dalam G20 merupakan salah satu tantangan terbesar Indonesia dalam mewujudkan tiga prioritas Presidensi G20 Indonesia, yaitu penguatan arsitektur kesehatan global; transformasi digital; dan

transisi energi yang berkelanjutan. Masyarakat internasional akan menilai kepemimpinan Indonesia selama menjalankan mandat sebagai Presiden G20 hingga November 2022. Presidensi G20 juga akan menempatkan Indonesia sebagai tuan rumah pertemuan Parlemen G20 (P20) di mana Delegasi DPR RI dapat berperan langsung mendukung langkah-langkah diplomasi yang dijalankan Pemerintah. Sementara itu, DPR RI juga akan menjadi tuan rumah pertemuan IPU Assembly ke-144 di Bali. Pertemuan yang akan dilaksanakan pada 20-24 Maret 2022 ini akan menjadi tantangan sekaligus peluang bagi DPR, sebagaimana yang dihadapi Pemerintah di G20.

Tahun 2022 akan menjadi tahun penting bagi diplomasi Indonesia, baik yang dijalankan Pemerintah maupun DPR. Untuk memastikan peran diplomasi DPR dapat berkontribusi optimal pada pencapaian kepentingan nasional Indonesia di forum internasional, dan mengupayakan Indonesia dapat berkontribusi optimal bagi berbagai permasalahan masyarakat internasional, DPR perlu menyusun strategi diplomasi yang mumpuni. Perlu dilakukan kajian yang komprehensif untuk memetakan isu-isu yang perlu menjadi prioritas DPR dalam menjalankan peran diplomasi parlemen. Posisi strategis delegasi DPR dalam forum kerja sama antarpemerintah akan turut menentukan kemampuan delegasi DPR RI untuk mempengaruhi arah kebijakan organisasi kerja sama antarpemerintah. Upaya mengejar posisi-posisi strategis ini pun perlu mempertimbangkan agenda diplomasi yang menjadi prioritas Pemerintah, sehingga kemudian dukungan diplomasi oleh parlemen memberi manfaat langsung terhadap upaya yang dijalankan Pemerintah.

## Penutup

Setiap langkah diplomasi DPR akan memiliki arti penting bagi tercapainya fokus kebijakan diplomasi Kementerian Luar Negeri dan terwujudnya kerja sama luar negeri yang setara dan saling menguntungkan. Namun untuk memastikan setiap langkah diplomasi DPR dapat membawa dampak yang optimal bagi kepentingan nasional Indonesia, dibutuhkan strategi diplomasi yang tepat, yang didukung oleh kapasitas dan aset diplomasi yang mumpuni. Uraian di atas telah menggambarkan tantangan dan fokus diplomasi Indonesia pada tahun 2022, dan bahwa 2022 merupakan tahun penting bagi diplomasi Indonesia. Untuk itu DPR perlu melakukan kajian yang komprehensif terhadap setiap tantangan dan peluang diplomasi yang akan dihadapi, berpedoman pada agenda diplomasi yang menjadi fokus Pemerintah, memperhatikan perkembangan global, mencermati kebijakan diplomasi setiap pemerintahan dan parlemen negara mitra, hingga memperhitungkan kemampuan delegasi DPR untuk mempengaruhi setiap isu, demi menyusun strategi diplomasi DPR yang fokus dan tepat sasaran.

## Referensi

- Bambang PS Brodjonegoro. "Multilateralisme dan Peran Indonesia di G-20", *Kompas*, 6 Januari 2022, hal. 6.
- "COVID-19: WHO chief optimistic disease will be beaten in 2022", <https://www.bbc.com/news/world-59840513> diakses 4 Januari 2022.
- "DPR Sukses Galang Dukungan Parlemen Dunia Percepat

Capaian SDGs”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/35060/t/DPR+Sukses+Galan+Dukungan+Parlemen+Dunia+Percepat+Capaian+SDGs> diakses 4 Januari 2022.

“Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2021”, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2048/berita/ Pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-tahun-2021> diakses 4 Januari 2022.

“Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Tahun 2022”, <https://kemlu.go.id/portal/id/read/3330/berita/ Pernyataan-pers-tahunan-menteri-luar-negeri-republik-indonesia-tahun-2022> diakses 7 Januari 2022.

“Puan Maharani Bicara Pemulihan Pasca-Pandemi di Forum Parlemen Dunia”, <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31936/t/Puan+Maharani+Bicara+Pemulihan+Pasca-Pandemi+di+Forum+Parlemen+Dunia> diakses 4 Januari 2022.

“WHO Director-General’s opening remarks at the press conference - 29 December 2021”, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-press-conference---29-december-2021> diakses 4 Januari 2022.



Rizki Roza  
[rizki.roza@dpr.go.id](mailto:rizki.roza@dpr.go.id)

Rizki Roza, S.Ip., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda bidang Hubungan Internasional pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: “*Confidence Building Measures* dan Program nuklir Iran” (2010); “Konflik Laut China Selatan dan implikasinya terhadap modernisasi militer” (2013); dan “Kerjasama internasional dan Peran industri sipil dalam industri pertahanan” (2013).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.